

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

KOTA CIREBON

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA CIREBON

2016

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang wajib dibuat oleh penyelenggara negara termasuk Satuan Kerja Instansi Pemerintah Daerah (SKPD). SAKIP dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, seluruh SKPD termasuk Bappeda diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun. Untuk periode tahunan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selanjutnya DPA tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun Perjanjian Kinerja SKPD.

Laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai SKPD berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang wajib disusun setiap akhir tahun termasuk oleh Bappeda.

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cirebon dibentuk berdasarkan:

- Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon.
- Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon .

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon mempunyai tugas pokok: *"Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan daerah"*.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Cirebon mempunyai fungsi: Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang perencanaan pembangunan, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan;

1. Pengoordinasian penyusunan bidang perencanaan pembangunan, bidang statistik, dan bidang penelitian pengembangan;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan; dan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, sesuai dengan SOTK yang tercantum dalam Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011) dan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon, adalah sebagai berikut :

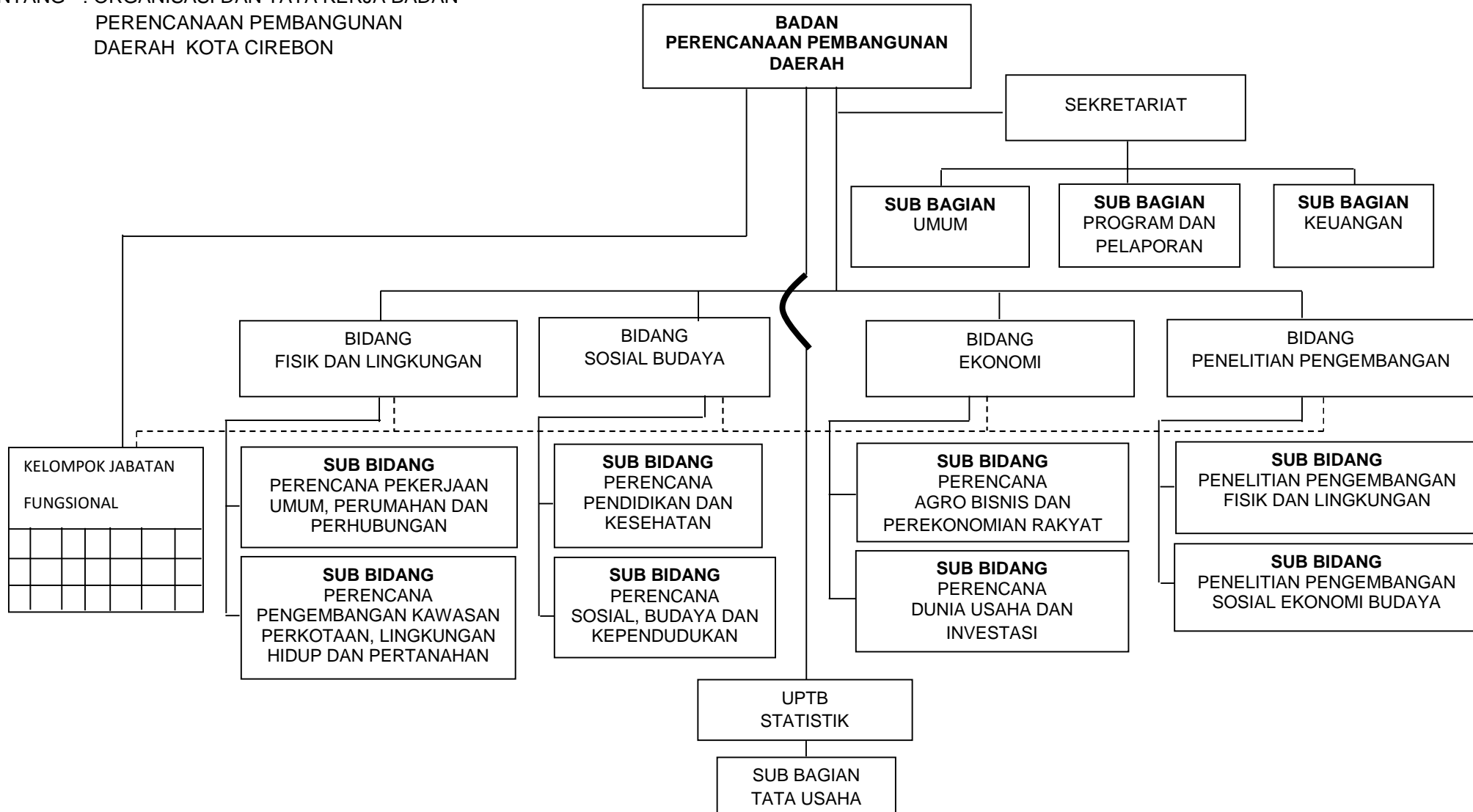
Susunan Organisasi Bappeda Kota Cirebon terdiri atas :

Kepala Badan, membawahkan:

1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Fisik dan Lingkungan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perencana Pekerjaan Umum, Perumahan dan Perhubungan; dan
 - b. Sub Bidang Perencana Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
3. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencana Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - b. Sub Bidang Perencana Sosial, Budaya dan Kependudukan.
4. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencana Agro Bisnis dan Perekonomian Rakyat; dan
 - b. Sub Bidang Perencana Dunia Usaha dan Investasi.
5. Bidang Penelitian Pengembangan, membawahkan:

- a. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Fisik dan Lingkungan;
dan
 - b. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- a. UPTB Statistik, membawahkan :
 - Sub Bagian Tata Usaha.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
 NOMOR : 46 TAHUN 2008
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH KOTA CIREBON



1.2. Aspek Strategis Bappeda

BAPPEDA sebagai Lembaga Teknis Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan daerah. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Cirebon dalam urusan perencanaan dapat ditinjau dari beberapa aspek :

1. Kelembagaan

Kelembagaan Bappeda Kota Cirebon sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu oleh Sekretaris dan empat Kepala Bidang yaitu Bidang Fisik dan Lingkungan, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial dan Budaya, dan Bidang Litbang.

2. Mekanisme Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*). Sistem perencanaan pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih calon Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan

yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka dengan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.

3. Hasil Kinerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Cirebon telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah : Penyusunan RPJPD Tahun 2005 - 2025 Kota Cirebon yang telah ditetapkan dalam bentuk Perda Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008.
- b. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah : Penyusunan RPJMD Tahun 2013-2018 Kota Cirebon yang telah ditetapkan dalam Perda Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013.
- c. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek : Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2016
- d. Dokumen Perencanaan Teknis Lainnya : penyusunan RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031 yang telah ditetapkan dalam Perda nomor 8 Tahun 2012.

- e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan, forum SKPD, penyusunan RKPD, KUA-PPAS, RAPBD dan APBD.

4. Sumber Daya Manusia

Komitmen pegawai yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan organisasi, salah satunya didukung oleh kondisi SDM nya. Komitmen para pegawai sangat dibutuhkan untuk menjamin konsistensi para pegawai terhadap pekerjaan yang dikerjakannya. Pegawai pun dituntut untuk terus menghasilkan prestasi yang kreatif dan inovatif, dan saat ini kondisi Bappeda, para pegawai cukup mempunyai komitmen untuk maju dan berkembang untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah khususnya kepada Bappeda.

Kerjasama antar staff yang baik

Suatu pekerjaan tidak dapat dikerjakan sendiri oleh pegawai, membutuhkan kerjasama yang baik, agar pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih berkualitas.

5. Dukungan Pembiayaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Cirebon Dengan adanya dukungan pembiayaan yang memadai, maka kinerja SKPD dalam melaksanakan kegiatan dapat lebih optimal.

6. Dukungan Teknologi Informasi

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, mempunyai pengaruh positif bagi kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari. Saat ini Pemerintah Kota Cirebon sudah memiliki Internet Service Provider (ISP) sendiri, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah terkoneksi internet. Bappeda saat ini dalam pengelolaan anggaran juga sudah menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi, yaitu melalui SP3D (Sistem Pengolahan Perencanaan Pembangunan Daerah).

1.3. Isu Strategis Bappeda

Aspek-aspek yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) bagi Bappeda Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang sangat cepat

Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah pengaruh dan perannya sangat kuat dan juga perubahan-perubahannya sangat cepat, dan tidak disertai dengan pembekalan-pembekalan terhadap SDM di Daerah, sehingga ketika Daerah baru terbiasa dengan satu kebijakan sudah harus berganti dengan kebijakan lainnya.

b. Keterlambatan SKPD dalam menyampaikan dokumen rencana

Seperti diketahui bersama, salah satu tugas Bappeda adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan terhadap data primer (data yang bersumber dari lapangan baik melalui observasi maupun kuesioner) dan data sekunder (data statistik dan data SKPD). Dalam menyelenggarakan suatu perencanaan tidak terlepas dari peran serta SKPD, namun seringkali SKPD terlambat dalam menyerahkan dokumen rencana sehingga proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan menjadi sering terlambat karena keterlambatan dalam pengumpulan data.

c. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan cenderung menurun

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat berarti karena pada dasarnya pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan adalah untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah juga sudah melibatkan unsur masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Hal ini

bisa dilihat dari peran masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Masyarakat terlibat dan turut memberikan kontribusi melalui usulan-usulan program kerja yang disampaikan melalui musrenbang kelurahan, dan juga melalui masukan-masukan kepada Pemerintah yang disampaikan pada forum Musrenbang. Namun saat ini peran sertanya justru cenderung menurun, mungkin mereka beranggapan bahwa program kerja Pemerintah sedikit sekali yang langsung memberikan dampak bagi mereka. Pemerintah saat ini lebih cenderung untuk membidik pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sebagai prioritas, padahal masyarakat membutuhkan perhatian dari pemerintah berupa kegiatan yang memberikan kontribusi langsung bagi kesejahteraan mereka, misalnya bantuan bagi kelompok-kelompok usaha kecil masyarakat.

d. Penguasaan Metodologi Perencanaan Masih Kurang

Penguasaan metodologi perencanaan sebagian pegawai masih kurang, hal ini perlu mendapat perhatian, karena penguasaan metodologi berguna untuk mengantisipasi regulasi kebijakan.

e. Belum memiliki SOP (Standard Operating Procedure)

Saat ini Bappeda belum memiliki SOP yang menjadi pedoman dan tolok ukur dalam membuat suatu dokumen rencana.

f. Data/Informasi perencanaan masih kurang

Ketersediaan data/informasi perencanaan dirasa masih kurang mencukupi, untuk itu perlu upaya agar kebutuhan akan data/informasi perencanaan dapat ditingkatkan.

g. Masih adanya kegiatan dalam APBD di luar dokumen rencana

Hal ini terjadi karena kurangnya komitmen bersama dalam menyelenggaraan APBD yang benar. Padahal dokumen rencana harus

menjadi komitmen bersama agar terlaksananya penyelenggaraan APBD yang sesuai dengan dokumen rencana.

h. Proses penyerapan Anggaran yang Rendah

Adapun tantangan pembangunan yang terjadi selama tahun 2015 adalah masih lambatnya pola penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengisian kas daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan rencana pelaksanaan kegiatan.

1.4. Rencana Strategis

a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Adapun Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon adalah **“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG ASPIRATIF DAN APLIKATIF”**

Makna yang terkandung didalam Visi tersebut ialah :

- ASPIRATIF, bahwa Bappeda Kota Cirebon sebagai satu-satunya pemegang otoritas perencanaan pembangunan dituntut untuk mampu mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang demi kemajuan Kota Cirebon.
- APLIKATIF, bahwa dalam mewujudkan aspirasi yang berkembang, Bappeda Kota Cirebon harus mampu memilih aspirasi yang betul-betul dapat diaplikasikan/dilaksanakan.

Adapun Misi Bappeda Kota Cirebon adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan.

2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Data Informasi Perencanaan Pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan maka perlu ditentukan Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon berupa Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Tertib Administrasi Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Kesesuaian APBD dengan Dokumen Perencanaan (100%)	Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
			Kesesuaian Rencana Kerja (Renja) terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	85%	85%	90%	95%	100%
2.	Meningkatkan dukungan data dan penelitian dalam perencanaan pembangunan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas ketersediaan data statistik dan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah	80%	80%	85%	90%	90%

b. Kebijakan, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Cirebon telah menetapkan kebijakan dan program sebagai berikut :

1. Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- Menyediakan bimbingan teknis untuk perencana
- Menyediakan pedoman dan tolok ukur kinerja pada Bappeda
- Menyediakan dukungan kebutuhan rutinitas kantor yg memadai
- Meningkatkan ketersediaan dan dukungan data dan informasi
- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan
- Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan dan rencana tindak penanganan permasalahan kota

2. Program

Program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2. Program Pelayanan administrasi perkantoran
3. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4. Program Peningkatan disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Data/Informasi
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
10. Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan
11. Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

12. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)
13. Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan
14. Program Kerjasama antar Pemerintah Daerah
15. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
16. Program Kerjasama Pembangunan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam rangka memudahkan penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka disusunlah rencana kinerja tahunan yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Adapaun rencana kinerja tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kesesuaian APBD dengan Dokumen Perencanaan (100%)	Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan	100%
	Kesesuaian Rencana Kerja (Renja) terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	85%
Meningkatnya kuantitas dan kualitas ketersediaan data statistik dan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah	80%

2.2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah disusun maka untuk mewujudkan hal tersebut dituangkan melalui rencana program dan kegiatan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Adapun uraian program dan kegiatan tersebut sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Kesesuaian APBD dengan Dokumen Perencanaan (100%)	Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan	100%	1. Program Pelayanan administrasi perkantoran	1.074.459.000,00
			2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.463.505.800,00

	Kesesuaian Rencana Kerja (Renja) terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	85%	<p>3. Program Peningkatan disiplin Aparatur 30.850.000,00</p> <p>4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 163.572.000,00</p> <p>5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 314.843.000,00</p> <p>6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.770.005.500,00</p> <p>7. Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan 239.336.500,00</p> <p>8. Program Kerjasama Pembangunan 140.470.000,00</p>	
Meningkatnya kuantitas dan kualitas ketersediaan data statistik dan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah	80%	<p>9. Program Pengembangan Data/Informasi 188.625.000,00</p> <p>10. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 389.326.000,00</p> <p>11. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 545.587.000,00</p> <p>12. Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan 1.270.231.500,00</p> <p>13. Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 95.939.500,00</p> <p>14. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 274.380.000,00</p> <p>15. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) 309.075.000,00</p>	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cirebon tahun 2015, yaitu :

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2015 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja dengan satuan rupiah.
2. Indikator Keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator (jumlah kegiatan); jumlah orang, jumlah laporan dan jumlah barang atau jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya.
3. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan/atau relatif (%).

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dalam PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi dan menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi namun menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi, misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$: Baik
- $75\% \leq X < 85\%$: Sedang
- $55\% \leq X < 75\%$: Cukup
- $X < 55\%$: Kurang

3.1. Capaian Kinerja Bappeda

Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cirebon menyajikan data hasil capaian

kinerja Bappeda tahun 2015 dan dibandingkan dengan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cirebon Tahun 2015 yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Cirebon, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon tahun 2015 dengan pembandingan tahun 2014 yang berkaitan dengan misi ke satu yaitu Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan dengan sasaran sebagai berikut:

❖ Meningkatkan Kesesuaian APBD dengan Dokumen Perencanaan

NO	INDIKATOR SASARAN	2015			2014	2013	KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
1.	Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Kesesuaian Rencana Kerja (Renja) terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	85%	85%	100%	92,31%	-	

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Kesesuaian APBD dengan Dokumen Perencanaan”, didukung oleh indikator yaitu “Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan” dan “Kesesuaian Rencana Kerja (Renja) terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)” dengan nilai capaian kinerja 100% dan didukung oleh Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Capaian sasaran meningkatnya kesesuaian APBD dengan Dokumen Perencanaan dari tahun 2013 sampai tahun 2015 menunjukkan nilai yang

meningkat, selama dua tahun berturut-turut target sasaran tersebut dapat direalisasikan semuanya.

Sasaran meningkatnya kesesuaian APBD dengan Dokumen Perencanaan didukung oleh beberapa sasaran pendukung yaitu:

- Tersedianya arahan dan pedoman pelaksanaan pembangunan

NO	INDIKATOR SASARAN	2015			2014	2013	KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
1.	Dokumen RKPD	1 dok	1 dokumen	100%.	100%.	100%.	
2.	Dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hasil revisi	1 dok	1 dokumen	100%	100%	100%	

Pencapaian sasaran “Tersedianya arahan dan pedoman pelaksanaan pembangunan”, didukung oleh indikator yaitu “Dokumen RKPD” dan “Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan nilai capaian kinerja 100% dan didukung oleh Program Perencanaan pembangunan daerah.

- Terfasilitasinya monitoring dan evaluasi ex ante

NO	INDIKATOR SASARAN	2015			2014	2013	KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
1.	Tersusunnya Renja SKPD	1 dok	1 dok	100 %	100 %	100%	
2.	Tersusunnya KUA-PPAS dan RKA-DPA SKPD	2 dok	2 dok	100%	100%	100%	

Pencapaian sasaran “Terfasilitasinya monitoring dan evaluasi ex ante”, didukung oleh indikator yaitu “Tersusunnya Renja SKPD” dan “Tersusunnya KUA-PPAS dan RKA SKPD” dengan nilai capaian kinerja 100% dan didukung oleh Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, dan Program Perencanaan pembangunan Daerah.

Capaian sasaran Terasilitasinya monitoring dan evaluasi ex ante pada Bappeda Kota Cirebon dari tahun 2013 sampai tahun 2015 menunjukkan nilai yang stabil, selama tiga tahun berturut-turut target sasaran berupa Tersusunnya Renja SKPD” dan “Tersusunnya KUA-PPAS dan RKA SKPD dapat direalisasikan 100%.

- Meningkatnya sistem capaian kinerja dan keuangan

NO	INDIKATOR SASARAN	2015			2014	2013	KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
1.	Tersedianya:						
	- Rencana kerja (Renja)	1 dok	1 dok	100%	100%	100%	
	- RKA / DPPA	2 dok	2 dok	100%	100%	100%	
	- LAKIP	1 dok	1 dok	100%	100%	100%	
	- Laporan Triwulan	4 dok	4 dok	100%	100%	100%	
	- Laporan Semesteran	2 dok	2 dok	100%	100%	100%	

Pencapaian sasaran “Meningkatnya system capaian kinerja dan keuangan”, didukung oleh indikator yaitu “tersedianya rancangan SPM bidang perencanaan, Rencana kerja (Renja), RKA/DPPA, LAKIP, Laporan Triwulan dan Laporan Semesteran” dengan nilai capaian kinerja 100% dan didukung oleh Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Capaian sasaran meningkatnya system capaian kinerja dan keuangan Bappeda Kota Cirebon dari tahun 2013 sampai tahun 2015 menunjukkan nilai yang stabil, selama tiga tahun berturut-turut target sasaran berupa penyusunan dokumen dapat direalisasikan semua (100%).

- Terciptanya kelancaran pelayanan kantor

NO	INDIKATOR SASARAN	2015			2014	2013	KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
1.	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100%	90,71%	90,71%	87,00%	100%	
2.	Terpenuhinya sarana prasarana aparatur yang memadai	100%	87,85%	87,85%	91,05 %	100%	

Pencapaian sasaran “Terciptanya kelancaran pelayanan kantor”, didukung oleh indikator yaitu “Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran” dan “Terpenuhinya sarana prasarana aparatur yang memadai” dengan nilai capaian kinerja 89,28% dan didukung oleh Program Pelayanan administrasi perkantoran dan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Capaian sasaran terciptanya kelancaran pelayanan kantor ini mengalami kenaikan sebesar 0,255% bila dibanding tahun 2014 yang sebesar 89,025%. Namun apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian pada tahun 2015 ini masih berada dibawah nilai capaian sasaran pada tahun 2013 yang mencapai 100%.

Pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 yang berkaitan dengan misi kedua, dengan sasaran :

- ❖ Meningkatnya kuantitas dan kualitas ketersediaan data statistik dan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan

NO	INDIKATOR SASARAN	2015			2014	2013	KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
1.	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah	80%	80%	96,43%	88,89%	88,89%	

Pencapaian sasaran “Meningkatnya kuantitas dan kualitas ketersediaan data statistik dan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan”, didukung oleh indikator yaitu “Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah” dengan nilai capaian kinerja 96,43% dan didukung oleh Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan tahun 2013, nilai capaian tahun ini sedikit mengalami penurunan.

Sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas ketersediaan data statistik dan hasil penelitian didukung oleh beberapa sasaran pendukung seperti:

- Meningkatnya sistem kinerja penyusunan dokumen rencana

NO	INDIKATOR SASARAN	2015			2014	2013	KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
1.	Tersedianya kajian dan penelitian untuk perencanaan	7 tema	6 tema	85,71%	100%	100%	

Pencapaian sasaran “Meningkatnya system kinerja penyusunan dokumen rencana”, didukung oleh indikator yaitu “Tersedianya kajian dan penelitian untuk perencanaan” dengan nilai capaian kinerja 85,71% dan didukung oleh Program Pengembangan Data/Informasi, Program Perencanaan Penelitian, Program Perencanaan pembangunan Daerah dan Pengembangan dan Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan.

Capaian sasaran meningkatnya system kinerja penyusunan dokumen rencana pada Bappeda Kota Cirebon pada tahun ini sedikit mengalami penurunan sebesar 14,29% jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100%. Hal ini dikarenakan ada 1 tema kajian bidang ekonomi yaitu mengenai rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil berdasarkan peraturan baru kewenangannya ditarik oleh pihak provinsi Jawa Barat.

- Tersedianya data dan informasi statistik daerah

NO	INDIKATOR SASARAN	2015			2014	2013	KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
1.	Tersedianya dokumen statistik daerah	7 dok	7 dok	100%	88,89%	88,89%	

Pencapaian sasaran “Tersedianya data dan informasi statistik daerah”, didukung oleh indikator yaitu “Tersedianya dokumen statistik daerah” pada tahun 2015 mencapai nilai 100% dimana tujuh dokumen yang ditargetkan dapat direalisasikan semua pada tahun ini. Ketujuh dokumen tersebut yaitu: Indikator Makro Daerah, IPM, PDRB, IKK, Profil Daerah, Selayang Pandang Kota Cirebon dan Sistem Informasi Pembanguna Daerah (SIPD). Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 dan 2014, capaian kinerja pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 11,11%.

- Terasilitasinya monitoring dan evaluasi on going

NO	INDIKATOR SASARAN	2015			2014	2013	KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
1.	Laporan Monev triwulan bidang fisik dan lingkungan	4 dok	4 dok	100 %	100%.	100%.	
2.	Laporan Monev triwulan bidang sosial budaya	4 dok	4 dok	100%	100%.	100%.	
3.	Laporan Monev triwulan bidang ekonomi	4 dok	4 dok	100%	100%.	100%.	

Pencapaian sasaran “Terasilitasinya monitoring dan evaluasi on going”, didukung oleh indikator yaitu “Laporan monev triwulan bidang fisik dan lingkungan”, “Laporan monev triwulan bidang sosial budaya” dan “laporan

money triwulan bidang ekonomi” dengan nilai capaian kinerja 100% dan didukung oleh Program Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Capaian sasaran Terasilitasinya monitoring dan evaluasi on going pada Bappeda Kota Cirebon dari tahun 2013 sampai tahun 2015 menunjukkan nilai yang stabil, selama tiga tahun berturut-turut target sasaran berupa Tersusunnya laporan money triwulan bidang fisling, sosbud dan ekonomi dapat dipenuhi 100%.

- Terasilitasinya monitoring dan evaluasi post ante

NO	INDIKATOR SASARAN	2015			2014	2013	KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
1.	Tersedianya dokumen evaluasi rencana pembangunan tahunan	1 dok	1 dok	100%	100%	100%	
2.	Tersedianya dokumen kinerja pertanggungjawaban Kepala daerah	1 dok	1 dok	100%	100%	100%	

Pencapaian sasaran “Terasilitasinya monitoring dan evaluasi post ante”, didukung oleh indikator yaitu “Tersedianya dokumen evaluasi rencana pembangunan tahunan” dan “Tersedianya dokumen kinerja pertanggungjawaban kepala daerah” dengan nilai capaian kinerja 100% dan didukung oleh Program Perencanaan Penelitian dan Pembangunan dan Program Perencanaan pembangunan Daerah.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2013, dan 2014, capaian kinerja pada tahun ini tidak mengalami penurunan. Artinya selama tiga tahun berturut-turut Bappeda mampu mempertahankan kinerja sasaran terfasilitasinya monitoring dan evaluasi post ante yang mencapai nilai 100%.

3.2. Realisasi Anggaran Bappeda

APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2014 Tanggal 23 Desember 2014 dan Penjabarannya melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 43 Tahun 2014 Tanggal 24 Desember 2014 yang kemudian ditetapkan dengan Perubahan APBD Kota Cirebon melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 dan penjabarannya melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 44 Tahun 2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015. Adapun APBD Kota Cirebon Tahun 2015 untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon dianggarkan sebagai berikut:

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI
BALANJA TIDAK LANGSUNG		3.516.632.000	3.390.162.241
BELANJA LANGSUNG		8.270.205.800	7.378.088.416
Urusan Rutin Yang ada Di Setiap SKPD :		2.732.386.800	2.445.075.466
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.074.459.000	974.609.268
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.463.505.800	1.285.682.698
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.850.000	30.292.500
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	163.572.000	154.491.000
Urusan Penataan Ruang:			
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
1.	Koordinasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	274.380.000	245.440.000
Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah:			
	Program Pengembangan Data dan Informasi		
1.	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	80.423.000	57.466.000
2.	Penyusunan Informasi Pembangunan Daerah	108.202.000	105.963.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1.	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	314.843.000	308.702.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
1.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	256.750.000	240.545.000
2.	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	117.405.000	117.405.000

3. Evaluasi RPJMD	90.000.000	89.453.250
4. Penyusunan KUA dan PPAS	119.965.000	119.965.000
5. Rencana Pengembangan Penyediaan Air Bersih	251.380.000	219.565.000
6. Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)	272.585.000	220.545.000
7. Publikasi dokumentasi perencanaan pembangunan	157.570.000	156.520.000
8. Koordinasi penanganan permasalahan lingkungan hidup dan perubahan iklim	82.668.000	67.320.000
9. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK)	72.673.000	71.273.000
10. Penyusunan rencana pengembangan pasar-pasar tradisional Kota Cirebon	97.524.500	97.474.500
11. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Dana Provinsi)	100.000.000	93.830.000
12. Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP)	151.485.000	147.785.000
Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan		
1. Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	165.709.000	165.709.000
2. Monitoring dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan	85.140.000	85.140.000
3. Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya	90.000.000	89.117.500
4. Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah	204.738.000	187.899.000
Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan		
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	365.720.500	174.466.000
2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	236.312.000	217.002.000
3. Koordinasi program-program masalah gender dan anak	105.795.000	103.795.000
4. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan	385.869.000	330.606.000
5. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Lingkungan	176.535.000	144.515.000
Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah		
1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	95.939.500	94.232.500
2. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	309.075.000	223.405.000
3. Koordinasi Sanitasi Perkotaan	309.075.000	223.405.000

	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan		
	1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	239.336.500	234.666.500
	Program Kerjasama Pembangunan Daerah		
	1. Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan	140.470.000	140.100.000
Urusan Statistik:			
1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		
	1. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB		
	2. Penyusunan IPM	61.462.000	60.110.400
	3. Penyusunan Profil Daerah	59.942.000	59.020.400
	4. Penyusunan Indikator Makro Daerah	78.927.000	78.347.000
	5. Penyusunan Selayang Pandang Kota Cirebon	60.887.000	59.585.400
	6. Penyusunan Indikator Kemahalan Konstruksi Kota Cirebon	68.411.000	67.187.500
		59.697.000	58.857.000

Dari jumlah Anggaran tersebut di atas, Anggaran yang terkait langsung dengan kegiatan adalah sebesar Rp8.270.205.800,00 dengan realisasi sebesar Rp7.378.088.416,00 (89,21%).

Dari total anggaran tersebut, anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran pada misi pertama “Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan” sebesar Rp5.197.041.800,00 dengan realisasi sebesar Rp4.770.224.716,00 atau sebesar 91,79% yang tersebar pada 8 program di bawah ini:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	1.074.459.000	974.609.268
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.463.505.800	1.285.682.698
3	Program Peningkatan disiplin Aparatur	30.850.000	30.292.500
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	163.572.000	154.491.000
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	314.843.000	308.702.000
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.770.005.500	1.641.680.750
7	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan	239.336.500	234.666.500
8	Program Kerjasama Pembangunan	140.470.000	140.100.000
	Jumlah	5.197.041.800	4.770.224.716,00

Sedangkan yang mendukung pencapaian sasaran pada misi kedua “Meningkatkan kuantitas dan kualitas data informasi perencanaan pembangunan” sebesar Rp3.073.164.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.607.863.700,00 atau 84,86% yang tersebar pada 7 program di bawah ini:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pengembangan Data/Informasi	188.625.000	163.429.000
2	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	389.326.000	383.107.700
3	Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	545.587.000	527.865.500
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	1.270.231.500	970.384.000
5	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	95.939.500	94.232.500
6	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	274.380.000	245.440.000
7	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	309.075.000	223.405.000
	Jumlah	3.073.164.000	2.607.863.700

BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 sebagai wujud pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2015.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon, yang terdiri dari dua sasaran dan tiga indikator utama yaitu:

1. Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dengan hasil capaian kinerja sebesar 100%
2. Kesesuaian Rencana Kerja (Renja) terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil capaian kinerja sebesar 100%
3. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah dengan nilai capaian kinerja sebesar 96,43%

Berdasarkan dari tiga indikator tersebut, diperoleh tingkat capaian kinerja Bappeda sebesar 98,81% yang merupakan rincian capaian kinerja sasaran pada Misi kedua Walikota dan Wakil Walikota Cirebon pada RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-2018, yaitu "Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN"

Sedangkan dari sisi anggaran, untuk mencapai dua sasaran dengan tiga indikator utama tersebut anggaran yang dapat direalisasikan BAPPEDA Kota Cirebon tahun 2015 sebesar 89,21% .

Cirebon, Januari 2016

KEPALA BAPPEDA KOTACIREBON

Ir. VICKY SUNARYA
NIP. 19590712 198503 1 023